

Melawan Radikalisme di Kampus

written by Harakatuna

Jagat akademik kita sempat dibuat heboh oleh keberadaan pelajar dan mahasiswa yang memiliki perspektif keagamaan ekstrim. Badan Intelijen Nasional (BIN) merilis temuan di lapangan bahwa ada sekitar 39 persen mahasiswa di Indonesia telah terpapar paham radikal. Di samping itu, ada 15 kampus yang teridentifikasi sebagai tempat pembasisan calon pelaku teror.

Sementara itu, Mata Air Fondation dan Alva Research Center juga merilis fakta mengejutkan. Ada sekitar 23,5 persen mahasiswa dan 16,3 persen pelajar menganggap bahwa Indonesia perlu mengupayakan berdirinya negara Islam dan juga penerapan syariat Islam secara utuh -dengan menjadikan syariat sebagai hukum negara. (Metronews.com)

Tentu saja, temuan-temuan ini amat mengkhawatirkan. Pasalnya, generasi mudalah yang menjadi korban, padahal di tangan merekalah nasib masa depan bangsa dipertaruhkan. Jadi, jika semenjak muda mereka telah dicekoki dengan paham radikalisme-ekstrimisme, dan hal ini tidak segera ditangani, mau jadi apa negara ini?

Telah banyak contoh konflik yang bermula dari paham ekstrim dan tertutup seseorang. Yang terbilang masih kasus baru adalah bom bunuh diri yang sempat mengguncang Surabaya -itu yang terdeteksi, apalagi yang tidak! Mereka merasa benar dengan keputusan menghabisi atau minimal menyakiti seseorang karena dianggap kafir, sesat, padahal hal demikian amat menyalahi ajaran agama manapun. Ironisnya, mereka mendasarkan diri pada dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadits, dua sumber otoritatif Islam -yang tentu tiada keraguan di dalamnya. Di sinilah sesat-paham mereka, yang enggan melihat konteks ayat dan/atau hadits, sehingga dalam mengambil keputusan amatlah tekstualis. Dari sikap ini, muncul riak-riak kecil pertikaian, yang merusak rajutan perdamaian yang telah membudaya di benak dan dada masyarakat Indonesia.

Maka dari itu, menyelamatkan generasi muda dari rayuan mematikan paham radikal, amatlah mendesak. Namun, dalam mengupayakan hal itu, kita tidak bisa menggunakan jalur frontal. Karena jika mereka dilawan dengan kekerasan, justru semakin kuat memegang teguh keyakinannya yang keliru. Sebagai contoh, pembubaran HTI memang telah menutup persebaran ideologi garis keras yang tak cocok bersemai di Nusantara. Namun, pada saat yang sama, eks-HTI atau simpatisannya, justru bisa makin bergerak leluasa tanpa pengawasan pemerintah. Mereka bisa bergerilya ke berbagai komunitas sosial, menularkan paham radikal mereka kepada masyarakat. Di sinilah tugas pemerintah dan masyarakat, untuk mengikis paham radikal di benak generasi mudanya.

Maka, solusi upaya deradikalisasi adalah dengan cara membumikan nilai-nilai persatuan dalam keragaman, sebagaimana yang tersirat dalam pilar negara, Bhineka Tunggal Ika. Kampus sebagai laboratorium ilmu pengetahuan, mesti dikondisikan sebagai tempat yang nyaman bagi persemaian nilai damai. Nilai-nilai luhur yang termaktub dalam Pancasila dan juga semangat Bhineka Tunggal Ika, mesti mewarnai kehidupan kampus.

Secara kurikulum, kampus perlu menyisipkan pendidikan damai; bisa berupa penjelasan logis mengenai urgensi Pancasila untuk merekatkan bangsa, dan metode penyampaiannya yang lebih mengedepankan proses dialogis. Pun, bisa juga mengadopsi ayat-ayat damai untuk disisipkan dalam perkuliahan; di sini dosen dan perspektif keagamaan yang moderat amat menentukan.

Di samping kurikulum, kampus juga perlu mengintervensi lembaga-lembaga kemahasiswaan. Diperlukan aturan dasar yang tegas, semacam 'seludupan misi' untuk menyebar damai, dalam menjalankan aktivitas lembaga tersebut.

Dengan begitu, proses pengejawantahan spirit Bhineka Tunggal Ika di kampus bisa berjalan dengan baik. Hal ini berarti merupakan upaya untuk mencetak

generasi cinta damai, yang memiliki spirit menyebarkan perdamaian. Negara yang masyarakatnya cinta damai, dengan begitu juga berpotensi untuk menjadi inisiator perdamaian dalam kancah internasional.

Oleh Latifatul Umamah, *mahasiswa MPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*